

DAMPAK KEBIJAKAN HARGA DASAR PEMBELIAN PEMERINTAH TERHADAP PENAWARAN DAN PERMINTAAN BERAS DI INDONESIA

***(Impact of Government Floor Price Purchasing Policy on Supply and Demand
of Rice in Indonesia)***

Ria Kusumaningrum¹⁾, Harianto²⁾, dan Bonar M. Sinaga²⁾

ABSTRACT

Rice consumption contributes the largest spending among Indonesian. Meanwhile, the changing price of rice is influenced by national inflation. Increased in rice consumption is caused by the increase of population. It is, therefore, clear that the problem of the rice price increament relates to rice demand and supply. This research was aimed to analyze (1) factors influenced the demand and supply of rice in Indonesia; (2) effectivity of government floor price purchasing policy (GFPPP) vis-à-vis brown rice price policy in frame of increasing rice production; (3) impact of GFPPP on rice demand and supply in Indonesia. The research used time series data ranging from the year of 1981 to 2005. Two stages least square (2SLS) method was used to analyze the data by means of SAS/ETS Version 6.12. It is concluded that the GFPPP increased rice supply in Indonesia. The GFPPP also increased rice price at farmer level and rice production, but decreased demand of the brown rice.

Keywords: rice, supply demand, policy of base price purchasing of government

PENDAHULUAN

Beras merupakan makanan pokok dari 98% penduduk Indonesia. Dalam komponen pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia, beras mempunyai bobot yang paling tinggi. Oleh karena itu, inflasi nasional sangat dipengaruhi oleh perubahan harga beras (Sutomo, 2005). Beras mempunyai peran yang strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan/stabilitas politik nasional (Suryana *et al.*, 2001). Beras bagi bangsa Indonesia dan negara-negara di Asia bukan hanya sekedar komoditas pangan atau ekonomi saja, tetapi sudah merupakan komoditas politik dan keamanan. Suryana *et al.* (2001) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih tetap menghendaki adanya pasokan (penyediaan) dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, dan dengan harga yang terjangkau. Kondisi itu menunjukkan bahwa beras masih menjadi komoditas strategis secara politis.

Begitu pentingnya peranan beras, negara-negara berkembang, terutama Indonesia, telah menjadikan swasembada beras sebagai tujuan kebijakan nasional. Kebijakan dan intervensi pemerintah terus diupayakan untuk mencapai swasembada, tetapi penawaran dan permintaan beras demikian dinamisnya.

¹⁾ Peneliti pada Pusat Studi Hewan Tropika, LPPM IPB

²⁾ Departemen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan, FEM, IPB

Dinamika penawaran dan permintaan beras yang merupakan barang strategis ini bukan saja menjadi menarik untuk diteliti, tetapi juga menjadi suatu kebutuhan.

Penduduk Indonesia mengalami laju pertumbuhan sekitar 1,49% per tahun sehingga permintaan beras akan selalu mengalami kenaikan (Krisnamurthi, 2002). Jumlah penduduk sebesar 218,87 juta jiwa (BPS, 2005) dan tingkat konsumsi rata-rata per kapita seminggu beras sebesar 1.844 kg (Susenas, 2005) mengakibatkan konsumsi beras sering kali melebihi produksi. Permasalahan timbul dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi beras di Indonesia. Secara umum, salah satu permasalahan permintaan beras di Indonesia adalah harga beras yang relatif tinggi dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Masalah kenaikan harga beras secara ekonomi adalah masalah penawaran dan permintaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan beras di Indonesia, (2) efektivitas perubahan kebijakan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) jika dibandingkan dengan kebijakan harga dasar gabah dalam upaya peningkatan produksi, dan (3) dampak kebijakan HDPP terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dan rentang waktu penelitian dari tahun 1981 sampai 2005. Periode dengan rentang waktu yang panjang ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberi *performance* yang lebih memuaskan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi terkait, yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Departemen Pertanian serta publikasi-publikasi lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah harga yang digunakan merupakan hasil deflasi dengan indeks harga konsumen tahun dasar (2.000=100) dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghindari pengaruh inflasi. Sehingga harga nominal yang diperoleh secara langsung dapat menjadi harga riil.

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, digunakan metode pendugaan *two stage least squares* (2SLS). Perhitungan penduga parameter persamaan struktural dilakukan dengan menggunakan program computer SAS/ETS versi 6.12 (*statistical analysis system econometric time series*).

Ukuran Kesejahteraan Produsen dan Konsumen

Ukuran kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan surplus produsen dan konsumen pada periode yang telah ditetapkan. Surplus produsen dan konsumen juga bisa digunakan sebagai indikator penentu arah kebijakan yang akan dilakukan. Analisis perubahan kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perubahan surplus produsen beras= $PBI_A(HGTPR_B - HGTPR_A) + \frac{1}{2}(PBI_B - PBI_A)(HGTPR_B - HGTPR_A)$
2. Perubahan surplus konsumen beras= $DBIN_A(HBER_A - HBER_B) + \frac{1}{2}(DBIN_B - DBIN_A)(HBER_B - HBER_A)$

Keterangan:

HGTPR = harga gabah tingkat petani DBIN = stok beras awal tahun
 PBI = produksi beras Indonesia HBER = harga beras eceran
 Subkript A = simulasi dasar
 Subkript B = simulasi kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia

Model merupakan suatu penjelas dari fenomena aktual sebagai suatu sistem atau proses. Model ekonometrika merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (*explanatory variables*) terhadap peubah endogen (*dependent variables*) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (*magnitude and sign*) dari penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis secara apriori (Koutsoyiannis, 1977).

Penawaran beras Indonesia

Penawaran beras Indonesia (QSBI) merupakan persamaan identitas dari penjumlahan produksi beras Indonesia (PBI) dikurangi dengan jumlah beras untuk benih/susut (JBB), ditambah stok beras awal tahun (SBAT), dan jumlah impor beras Indonesia (JIB) dikurangi jumlah ekspor (EKSPOR). Persamaannya adalah:

$$QSBI_t = PBI_t - JBB_t + SBAT_t - JIB_t - SKSPOR_t \dots\dots\dots (1)$$

Luas areal panen

Luas panen padi (LAP) merupakan fungsi dari harga gabah (HGTPR), harga tanaman lain sebagai kompetitif dari padi (dalam studi ini adalah tanaman jagung) (HJTPR), kredit usaha tani (KUTR), luas areal intensifikasi (LAI), luas areal irigasi (LASI), curah hujan (CH), luas areal serangan hama penyakit (LSHP), dan luas areal padi tahun lalu. Persamaan luas areal padi adalah:

$$LAP = 6.550.717 + 93,660683HGTPR - 152,4175HJTPR + 0,0000000KUTR + 0,033944LAI + 0,409012LASI + 453,81563CH + 1,720040LSHP + 0,104798LLAP \dots\dots\dots (2)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9369

Produktivitas padi

Produktivitas padi (YPP) di Indonesia merupakan fungsi dari harga gabah tingkat petani (HGTPR), jumlah penggunaan pupuk (JPU), luas serangan hama penyakit (LSHP), dan produktivitas padi tahun lalu (LYPP). Persamaan produktivitas padi per hektar adalah:

$$YPP = 1.254,5679 + 0,030413HGTPR + 1,202223JPU - 0,000197LSHP 0,667941LYPP \dots\dots\dots (3)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9444

Produksi padi dan beras

Jumlah produksi padi gabah (PBI) merupakan perkalian antara respon luas areal panen (LAP) dengan produktivitas padi (YPP). Selanjutnya, jumlah produksi beras Indonesia di dalam penelitian ini diperoleh dari perkalian antara produksi padi (PPI) dengan angka konversi (K). Secara matematis persamaan produksi padi (PPI) dan produksi beras Indonesia (PBI) adalah:

$$PPI_t = LAP_t * YPP_t \dots\dots\dots (4)$$

$$PBI_t = LAP_t * K_t \dots\dots\dots (5)$$

Pembentukan total permintaan beras Indonesia diperoleh dari beras untuk konsumsi, beras untuk benih, penggunaan lainnya, susut dan tercecer, dan stok beras akhir tahun. Jumlah beras untuk benih, penggunaan lainnya, susut dan tercecer (JBB) diasumsikan merupakan suatu proporsi tertentu (PROB) dari total produksi beras Indonesia (PBI) yang dirumuskan dalam persamaan identitas berikut:

$$JBB_t = PROB_t * PBI_t \dots\dots\dots (6)$$

Stok beras Indonesia

Bulog sebagai suatu lembaga pangan yang bertugas mempengaruhi harga tentu mempunyai cadangan stok beras untuk dapat mempengaruhi harga di pasaran. Fungsi persamaan stok beras akhir tahun (SBAT) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga beras eceran (HBER), jumlah pelepasan beras (JLGB), jumlah impor beras Indonesia (JIB), rasio operasi pasar (OP/LOP) dan jumlah stok beras Indonesia tahun lalu (LSBAT). Persamaannya adalah

$$SBAT = 1.971.868.102 - 232.964HBER + 0,011363JLGB - 0,079341JIB + 229.561.803(OP/LOP + 0,202700LSBAT) \dots\dots\dots (7)$$

Prob>F = 0,07681 R² = 0,3859

Pengadaan dan pelepasan stok

Perumusan tentang pengadaan dan pelepasan stok beras dimaksudkan untuk mengetahui peranan Bulog dalam menstabilkan harga gabah/beras bagi kepentingan produsen dan konsumen. Persamaan pengadaan stok beras (JPGB) adalah

$$JPGB = -1.644.278.030 + 757.876HGTP + 0,423227SBAT + 0,000184TAPB + 0,104019PBI - 32.695.920INF - 80.092.816TW + 0077813LJPGB .. (8)$$

Prob>F = 0,0069 R² = 0,6367

Faktor yang mempengaruhi pelepasan stok beras (JLGB) adalah:

$$JLGB = 246.792.709 + 0,046742DBIN + 0,133235LSBAT + 87.307.742 + ((JPGB - LJPGB) / LJPGB) + 0,523563LJLGB \dots\dots\dots (9)$$

Prob>F = 0,0087 R² = 0,4778

Impor beras Indonesia

Jumlah impor beras Indonesia (JIB) dipengaruhi oleh harga impor beras Indonesia (HIBIR), nilai tukar rupiah terhadap dolar (ER), stok beras awal tahun (LSBAT), perubahan harga beras eceran (HBER-LHBER), produksi beras Indonesia (PBI), dan jumlah impor tahun lalu (LJIB). Persamaan jumlah impor beras (JIB) adalah

$$JIB = 2.353.255 - 959.062.181HIBIR - 38.279ER - 0,427111LSBAT + 2.850.153(HBER - LHBER) - 0,027828PBI + 0,599169LJIB \dots \quad (10)$$

Prob>F = 0,0035 R² = 0,6254

Harga impor beras Indonesia (HIBIR) dipengaruhi oleh perubahan harga beras dunia (HBDR-LHBDR), perubahan tarif impor beras (TARIF-LTARIFR), dan harga impor beras Indonesia tahun lalu (LHIBIR). Persamaan harga impor beras adalah

$$HIBIR = 0,007476 + 0,347542(HBDR - LHBDR) + 0,0000062 (TARIFR - LTARIFR) + 0,958501LHIBIR \dots \quad (11)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9741

Permintaan beras Indonesia

Secara teoritis, permintaan terhadap suatu barang akan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkompetensi (substitusi), selera, pendapatan dan jumlah penduduk. Dalam studi ini persamaan permintaan beras untuk konsumsi secara nasional (DBIN) adalah

$$DBIN = -7.465.478.498 - 4.604.952HBER + 9.254.855HJTPR + 137,379397JPI + 0,000000645PPP + 0,328305LDBIN \dots \quad (12)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9533

Harga beras eceran

Harga eceran beras (HBER) dijadikan sebagai peubah endogen, hal ini bertujuan agar dapat diketahui dampak kebijakan penghapusan subsidi output (beras) terhadap kesejahteraan produsen maupun konsumen. Persamaan harga beras eceran (HBER) adalah

$$HBER = 878,247040 + 0,716513HGTPR - 0,0000000518PBI + 62,598934TW + 0,425310LHBER \dots \quad (13)$$

Margin pemasaran beras Indonesia

Marjin pemasaran beras Indonesia (MPBI) dapat didefinisikan sebagai selisih antara harga beras tingkat konsumen (HBER) dengan harga gabah setara beras di tingkat petani (HGTPR) pada skala nasional, yaitu

$$MPBI_t = HBER_t + HGTPR_t * K_t \dots \quad (14)$$

Pendapatan usaha tani petani Indonesia

Total pendapatan petani padi diekpresikan dalam bentuk persamaan identitas sebagai berikut:

$$PUPP_t = (HGTPR_t * PPI_t) - (HPUR_t * JPU_t) - (HTSPR_t * JPS_t) - UTKR_t - BPKR_{tt} - BPIR_t - SHAR_t - BPLNR_t \dots \quad (15)$$

Dengan PUPP_t adalah pendapatan usaha tani petani padi (Rp/Ha), UTKR_t adalah upah tenaga kerja (Rp/Ha), BPKR_t adalah biaya pupuk kandang (Rp/Ha), BPIR_t adalah biaya pengairan irigasi (Rp/Ha), SHAR_t adalah biaya sewa hewan dan alat (Rp/Ha), dan BPLNR_t adalah biaya lain-lain (Rp/Ha).

Harga gabah tingkat petani

Harga gabah yang berlaku di tingkat petani secara nasional (HGTPR) dijadikan sebagai variabel endogen. Harga gabah tingkat petani, selain ditentukan oleh harga dasar pembelian pemerintah (HDPP), juga dipengaruhi oleh harga impor beras Indonesia (HIBIR), margin pemasaran (MPBI), jumlah produksi dan harga gabah tahun lalu. Persamaan harga gabah tingkat petani adalah

$$HGTPR = 568,653456 + 0,294742(HIBIR * ER) + 0,957381HPP + 0,927381MPBI - 0,0000000987PPI + 0,185887LHGTPR \dots\dots\dots (15)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,7729

Harga dasar pembelian pemerintah

Pemerintah setiap tahun mengeluarkan suatu harga dasar gabah (HDG), sekarang telah menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) untuk menjaga agar harga gabah tidak jatuh pada saat panen raya. Pemerintah mempertimbangkan harga beras dunia (HBDR) dalam menetapkan HDPP. Selain itu, mempertimbangkan harga beras dunia merupakan antisipasi untuk liberalisasi perdagangan beras dan agar produksi padi efisien sehingga peningkatan HDG/HDPP akan memberikan peningkatan pendapatan. Persamaan HDG/HDPP adalah

$$HPPR = 159,925432 + 11,721493HBDR + 0,049570ER + 0,544176LHDPP \dots\dots (17)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9210

Penggunaan pupuk urea

Persamaan jumlah penggunaan pupuk urea (JPU) per hektar merupakan fungsi dari harga pupuk urea (HPUR) itu sendiri, harga gabah tingkat petani (HGTPR), luas areal intensifikasi (LAI), perubahan luas areal irigasi (LASI-LLASI), dan jumlah penggunaan pupuk tahun lalu (LJPU). Persamaan jumlah penggunaan pupuk urea adalah sebagai berikut:

$$JPU = 94,904372 - 0,022103HPUR + 0,006881HGTPR + 0,000007191LAI + 0,000000903(LASI - LLASI) + 0,082796LJPU \dots\dots\dots (15)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,8625

Jumlah penggunaan TSP

Persamaan jumlah penggunaan TSP (JTSP) per hektar merupakan fungsi dari harga TSP itu sendiri (HTSPR), harga gabah tingkat petani (HGTPR), luas areal intensifikasi (LAI), luas areal irigasi (LASI) dan jumlah penggunaan TSP tahun lalu (LJPU). Persamaan jumlah penggunaan TSP adalah

$$JTSP = -51,099673 - 0,023460HTSPR + 0,006575HGTPR + 0,000008039LAI + 0,000008749LASI + 0,255061LJTSP \dots\dots\dots (15)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9481

Jumlah pemakaian pestisida

Persamaan jumlah penggunaan pestisida (JPS) per hektar merupakan fungsi dari harga pestisida itu sendiri (HPSR), harga gabah tingkat petani (HGTPR), perubahan luas areal intensifikasi (LAI), luas areal irigasi (LASI) dan jumlah penggunaan pestisida tahun lalu (LJPU). Persamaan jumlah penggunaan pestisida adalah

$$JPS = -1,027094 - 0,000012HPRS + 0,372109(HGTPR - LHGTPR) + 0,000000338(LAI - LLAI) + 0,000000,233LASI + 0,892718LJPU \dots\dots\dots (20)$$

Prob>F = 0,0001 R² = 0,9646

Penerimaan pemerintah dan devisa

Persamaan penerimaan pemerintah dan devisa (PPMR) merupakan persamaan identitas. Persamaan penerimaan pemerintah adalah

$$PPMR_t = TARIFR_t * JIB_t \dots\dots\dots (21)$$

dan persamaan devisa adalah

$$DEVISA_t = HIBIR_t * JIB_t \dots\dots\dots (22)$$

Validasi Model Penawaran dan Permintaan Beras Indonesia

Simulasi kebijakan bertujuan menganalisis dampak berbagai alternatif kebijakan dengan cara mengubah nilai peubah kebijakannya. Akan tetapi, sebelum melakukan alternatif simulasi kebijakan terlebih dahulu dilakukan validasi model untuk melihat apakah nilai dugaan sesuai dengan nilai aktual masing-masing peubah endogen (Pindyck dan Rubinfeld, 1991).

Model penawaran dan permintaan beras dalam penelitian ini telah diuji dengan simulasi dasar untuk sampel pengamatan 1981-2005. Dari penelitian ini diketahui terdapat 16 persamaan dalam model mempunyai nilai RMSPE lebih kecil dari 35%, empat persamaan mempunyai RMSPE antara 35%-100% dan dua persamaan mempunyai nilai lebih besar dari 100%. Berdasarkan kriteria U-Theil's, terdapat 19 persamaan dari 22 persamaan mempunyai nilai U lebih kecil dari 0,25, sedangkan terdapat tiga persamaan yang mempunyai nilai U lebih besar dari 0,25.

Tabel 1. Dampak alternatif kebijakan harga dasar pembelian pemerintah serta kombinasinya terhadap perubahan nilai rata-rata endogen dan perubahan indikator kesejahteraan ekonomi periode 1981-2005, 1981-2002, dan 2002-2005

Nama peubah	Satuan	Perubahan simulasi (%)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LAP	Ha	0,091	0,082	0,135	0,091	0,082	0,135	1,123	1,114	1,166	0,123	0,114	0,168	1,154	1,145	1,199
YPP	Kg/Ha	0,094	0,096	0,133	0,094	0,072	0,133	0,236	0,215	0,288	0,118	0,119	0,177	0,236	0,215	0,311
PPI	Kg	0,191	0,170	0,281	0,180	0,159	0,270	1,347	1,322	1,450	0,246	0,224	0,340	1,402	1,376	1,510
PBI	Kg	0,190	0,171	0,282	0,179	0,161	0,273	1,345	1,322	1,451	0,245	0,224	0,342	1,400	1,379	1,511
JBB	Kg	0,192	0,172	0,282	0,180	-0,365	0,272	1,347	1,323	1,450	0,246	0,225	0,341	1,401	1,377	1,510
JPU	Kg/Ha	0,393	0,354	0,575	0,175	0,129	0,391	2,565	7,997	2,935	0,311	0,264	0,533	2,484	2,397	2,893
JTSP	Kg/Ha	0,749	0,701	0,934	0,748	0,700	0,934	7,481	7,609	6,986	1,008	0,967	1,164	7,740	7,875	7,216
JPS	Kg/Ha	1,625	1,607	1,678	1,625	1,604	1,678	9,811	10,182	8,512	2,255	2,300	2,086	10,442	10,874	8,920
SBAT	Kg	-0,032	-0,030	-0,048	-0,032	-0,047	-0,048	-0,075	-0,071	-0,099	-0,115	-0,095	-0,232	-0,158	-0,136	-0,284
JIB	Kg	12,569	11,391	17,984	12,593	11,415	18,005	10,204	9,048	15,517	15,986	15,002	20,515	13,621	12,658	18,048
HIBIR	US\$/Kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,127	0,000	0,127
QSBI	Kg	0,991	0,900	1,370	0,979	0,888	1,363	2,005	1,915	2,385	1,265	1,186	1,591	2,278	2,201	2,607
DBIN	Kg	-1,379	-1,282	-1,772	-1,379	-1,286	-1,772	-1,181	-1,083	-1,590	-1,856	-1,774	-2,210	-1,663	-1,575	-2,027
JPGB	Kg	4,162	3,713	6,396	4,142	3,692	6,376	6,206	5,710	8,669	5,559	5,088	7,899	7,603	7,085	10,173
JLGB	Kg	-0,216	-0,114	-0,684	-0,218	-0,116	-0,685	-0,018	0,091	-0,519	-0,353	-0,244	-0,855	-0,154	-0,038	-0,690
MPBI	Rp/Kg	0,668	0,709	0,583	0,685	0,730	0,583	-1,097	-1,323	-0,525	0,918	1,000	0,758	-0,848	-1,033	-0,350
HBER	Rp/Kg	4,330	4,197	4,617	4,330	4,197	4,617	3,737	3,541	4,144	5,813	5,836	5,722	5,219	5,180	5,249
HGTPR	Rp/Kg	8,893	7,935	13,000	8,893	7,935	13,000	9,732	8,788	13,846	11,913	11,007	16,231	12,752	11,775	17,077
PPPR	Rp/Kg	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
PUPP	Rp/Ha	10,161	9,148	14,500	10,066	9,050	14,417	11,116	10,088	15,517	13,595	12,569	17,990	14,553	13,512	19,012
PPMR	Rp	16,546	16,158	17,342	16,564	16,176	17,363	14,658	14,553	14,877	32,072	32,178	31,848	29,994	30,408	29,135
DEVISA	US\$	11,918	11,498	18,102	11,944	11,524	18,123	9,326	8,899	15,620	15,764	15,418	20,862	13,171	12,817	18,376
Surplus Produsen	Rp miliar	3,076	2,621	5,646	3,076	2,621	5,645	3,386	2,920	6,048	4,122	3,637	7,051	4,438	3,913	7,462
Surplus Konsumen	Rp miliar	-1,786	-1,493	-3,563	-1,786	-1,493	-3,563	-1,540	-1,258	-3,195	-2,403	-2,081	-4,425	-2,156	-1,845	-4,056

Keterangan:

- Simulasi 1. Menaikkan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) sebesar 15% periode 1981-2005
- Simulasi 2. Menaikkan HDPP sebesar 15% periode 1981-2001
- Simulasi 3. Menaikkan HDPP sebesar 15% periode 2002-2005
- Simulasi 4. Menaikkan HDPP sebesar 15% dan harga pupuk urea 5% periode 1981-2005
- Simulasi 5. Menaikkan HDPP sebesar 15% dan harga pupuk urea 5% periode 1981-2001
- Simulasi 6. Menaikkan HDPP sebesar 15% dan harga pupuk urea 5% periode 2002-2005
- Simulasi 7. Menaikkan HDPP sebesar 15%, luas areal intensifikasi dan irigasi 5% periode 1981-2005
- Simulasi 8. Menaikkan HDPP sebesar 15%, luas areal intensifikasi dan irigasi 5% periode 1981-2001
- Simulasi 9. Menaikkan HDPP sebesar 15%, luas areal intensifikasi dan irigasi 5% periode 2002-2005
- Simulasi 10. Menaikkan HDPP sebesar 15%, harga pupuk urea 5%, nilai tukar dan tarif impor 10% periode 1981-2005
- Simulasi 11. Menaikkan HDPP sebesar 15%, harga pupuk urea 5%, nilai tukar dan tarif impor 10% periode 1981-2001
- Simulasi 12. Menaikkan HDPP sebesar 15%, harga pupuk urea 5%, nilai tukar dan tarif impor 10% periode 2002-2005
- Simulasi 13. Menaikkan HDPP sebesar 15%, harga pupuk urea, luas areal intensifikasi dan irigasi 5%, nilai tukar dan tarif impor 10% periode 1981-2005
- Simulasi 14. Menaikkan HDPP sebesar 15%, harga pupuk urea, luas areal intensifikasi dan irigasi 5%, nilai tukar dan tarif impor 10% periode 1981-2001
- Simulasi 15. Menaikkan HDPP sebesar 15%, harga pupuk urea, luas areal intensifikasi dan irigasi 5%, nilai tukar dan tarif impor 10% periode 2002-2005

Nilai U-Theil's tertinggi adalah 0,4142, yaitu pada persamaan devisa dan nilai RMSPE-nya lebih besar dari 100%, tetapi tidak terjadi bias sistematis sebab nilai $U_M = 0,406$. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan, model ini cukup baik digunakan sebagai model pendugaan. Oleh karena itu, model struktural yang telah dirumuskan dapat digunakan untuk simulasi alternatif kebijakan historis periode 1981 sampai 2005, 1981 sampai 2001 dan 2002 sampai 2005.

Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kenaikan HDPP dimaksudkan untuk melindungi petani sebagai produsen beras, yaitu agar mendapatkan harga yang layak. Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa kebijakan menaikkan harga dasar sebesar 15% dari harga rata-rata kebijakan yang telah diterapkan berdampak pada peningkatan produksi padi di Indonesia. Peningkatan produksi padi tertinggi pada periode kebijakan HDPP adalah sebesar 0,282% sehingga akan meningkatkan penawaran beras di Indonesia sebesar 1,370%. Kebijakan ini juga akan meningkatkan harga gabah tingkat petani dan akan meningkatkan pendapatan usaha tani padi per hektar. Namun, juga akan berdampak pada peningkatan harga beras eceran sehingga permintaan beras untuk konsumsi akan berkurang. Marjin pemasaran beras tertinggi terjadi pada periode kebijakan harga dasar gabah, artinya selisih harga petani dengan harga yang diterima konsumen lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua periode lainnya. Selain itu, pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dampak alternatif kebijakan meningkatkan HDPP dari ketiga periode yang dianalisis bersifat bias ke produsen padi. Kebijakan ini memberikan keuntungan kepada produsen karena terjadi peningkatan pada surplus produsen, sedangkan konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus konsumen.

Dampak Kombinasi Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah

Kombinasi kebijakan HDPP berdampak pada peningkatan produksi padi Indonesia dan akan berdampak pada peningkatan penawaran beras Indonesia. Namun, peningkatan produksi beras Indonesia tidak dapat mengurangi jumlah impor. Hal ini terjadi karena model ataupun data tidak dapat menangkap fenomena waktu dengan baik karena untuk impor biasanya ada lag waktu sejak dari pesan sampai barang tiba di Indonesia. Kombinasi kebijakan ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha tani padi per hektar, yang disebabkan oleh peningkatan harga gabah tingkat petani akibat dari peningkatan HDPP.

Kombinasi kebijakan 4, 5, 6, 10, 11, dan 12 berdampak pada peningkatan marjin pemasaran beras di Indonesia, artinya selisih antara harga beras eceran dan harga gabah tingkat petani meningkat. Untuk kombinasi kebijakan 7, 8, 9, 13, 14, dan 15 berlaku sebaliknya atau terjadi penurunan marjin pemasaran beras di Indonesia.

Harga beras impor mengalami peningkatan pada kombinasi kebijakan 12 dan 15, sedangkan untuk kombinasi kebijakan lainnya tidak mengalami perubahan pada harga beras impor. Kombinasi kebijakan ini juga berdampak pada penurunan permintaan beras Indonesia akibat dari kenaikan harga beras eceran. Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dampak kombinasi kebijakan HDPP bersifat

bias ke produsen padi karena dalam hal ini konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang dampak kebijakan HDPP terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beras Indonesia adalah produksi beras Indonesia, jumlah beras untuk benih/susut, stok beras akhir tahun, dan jumlah impor dan ekspor beras Indonesia. Permintaan beras untuk konsumsi Indonesia dipengaruhi oleh harga beras eceran, harga jagung (sebagai barang substitusi), jumlah penduduk Indonesia, pendapatan penduduk Indonesia, dan permintaan beras tahun sebelumnya. Kebijakan HDPP lebih efektif jika dibandingkan dengan harga dasar gabah jika dilihat dari sisi peningkatan produksi karena persentase peningkatan produksi periode HDPP lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode HDG. Kebijakan menaikkan HDPP sebesar 15% lebih tinggi dari rata-rata kebijakan yang telah diterapkan akan berdampak pada peningkatan produksi padi. Kebijakan ini juga akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari impor. Begitu pula dengan kombinasi kebijakan menaikkan HDPP bersamaan dengan kebijakan lain seperti harga pupuk urea, luas areal intensifikasi, luas areal irigasi, tarif impor, dan nilai tukar akan berdampak pada peningkatan produksi padi Indonesia, tetapi jumlah permintaan beras akan menurun disebabkan oleh peningkatan harga beras eceran. Kombinasi kebijakan ini memberikan keuntungan kepada produsen karena surplus produsen meningkat, sedangkan konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus konsumen.

Saran

- (1) Sebaiknya kebijakan HDPP diikuti oleh kebijakan perberasan lainnya seperti kebijakan meningkatkan luas areal intensifikasi dan luas areal irigasi untuk meningkatkan produksi padi yang lebih tinggi.
- (2) Untuk tetap mempertahankan kesejahteraan rakyat (konsumen) yang telah dirugikan akibat diterapkannya kebijakan HDPP, pemerintah seharusnya memberikan kompensasi kerugian konsumen dengan dana yang diperoleh dari peningkatan penerimaan pemerintah akibat adanya kebijakan HDPP, seperti adanya beras miskin (raskin) yang selama ini telah diprogramkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2005. Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Krisnamurthi B. 2002. Prosiding seminar: tekanan penduduk, degradasi lingkungan dan ketahanan pangan. Bogor: Pusat Studi Pembangunan dan Proyek Koordinasi Kelembagaan Ketahanan Pangan.
- Koutsoyiannis. 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition*. London: The MacMillan Press Ltd.

Pindyck RS, dan Rubinfeld DL. 1991. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Edition. New York: McGraw-Hill Inc.

[SUSENAS]. 2005. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Suryana A, Winoto J, dan Krisnamurti B. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sutomo S. 2005. Kontribusi beras dalam inflasi nasional. *Majalah Pangan*, 25(44).